

## Efektivitas Penempatan Tentara Cadangan dalam Perang Rusia-Ukraina

Kadek Wema Satyadinata<sup>1)\*</sup>

<sup>1)</sup>[Wemasatyadinata@iikmpbali.ac.id](mailto:Wemasatyadinata@iikmpbali.ac.id), Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi, dan Humaniora (FBSTH), Universitas Bali Internasional, Indonesia

\*) coresponding author

Dikirim: 2022-12-25

Direvisi: 2023-02-04

Diterima: 2023-02-15

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penempatan tentara cadangan dalam perang Rusia-Ukraina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur, dimana sumbernya berasal dari beberapa literatur yang digunakan baik berupa buku, jurnal dan media online sebagai referensi. Selanjutnya menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran, meneliti kata-kata, laporan terinci, dan melakukan studi pada situasi yang alami, dimana peneliti menggambarkan dan menjelaskan tentang efektivitas penempatan tentara cadangan dalam perang Rusia-Ukraina. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Rusia berusaha mempercepat mobilisasi militer, dengan mengerahkan penduduk untuk ikut wajib militer, guna memperkuat pasukannya dalam perang melawan Ukraina. Menteri pertahanan Rusia Shoigu merinci 300 ribu orang harus ikut wajib militer, terutama mereka yang memiliki pengalaman tempur dan keahlian militer yang dibutuhkan tentara Rusia. Kemudian, dari pengerahan ratusan ribu tentara cadangan itu ternyata tidak efektif, karena tak semua warga Rusia dapat menerima keputusan pemerintahan Presiden Putin.

**Kata kunci** : tentara cadangan; perang rusia-ukraina; vladimir putin; NATO; ancaman militer.

### ABSTRACT

*This paper aims to describe the effectiveness of the placement of reserve troops in the Russian-Ukrainian war. The method used in this study is the literature study method, where the source comes from several literatures that are used in the form of books, journals and online media as references. Furthermore, using a qualitative approach. In this approach, the researcher makes an overview, examines words, detailed reports, and conducts studies in natural situations, where the researcher describes and explains the effectiveness of the placement of reservists in the Russian-Ukrainian war. Based on the results of this study, it is known that Russia is trying to speed up military mobilization, by mobilizing the population to join military service, in order to strengthen its troops in the war against Ukraine. Russian Defense Minister Shoigu detailed that 300,000 people must take part in conscription, especially those with combat experience and military expertise needed by the Russian army. Then, the deployment of hundreds of thousands of reservists turned out to be ineffective, because not all Russian citizens could accept the decisions of President Putin's government.*

**Keywords:** reserves; russian-ukrainian war; vladimir putin; NATO; military threat.

Copyright (c) 2023, Kadek Wema Satyadinata.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pada 2001, Ukraina tercatat memiliki penduduk sekitar 48 juta jiwa. Kemudian jumlahnya menyusut menjadi 45 juta orang di tahun 2014, menurut data yang dikeluarkan World Bank pada 2016. Adapun penduduk Ukraina terdiri dari sekitar 78 persen etnik Ukraina, 17 persen etnik Rusia, dan sisanya 6 persen dari etnik lain, seperti Belarus, Rumania, Lithuania, Polandia, Yahudi, dan sebagainya.

Sementara etnik Rusia telah menyebar di sejumlah wilayah. Mereka terkonsentrasi di wilayah timur dan selatan, di mana jumlahnya 58 persen di Crimea, 39 persen di Luhansk, 38 persen di Donetsk, 26 persen di Kharkiv, 25 persen di Zaporozhe dan 21 persen di Odessa. Di kota-kota ini, proporsi etnik Rusia lebih tinggi.

Dari jumlah tersebut, tercatat orang yang berbahasa Rusia lebih besar dibandingkan orang yang dianggap sebagai etnik Rusia. Selanjutnya, dalam hal Bahasa yang digunakan, 68 persen penduduk menyatakan bahwa Ukraina merupakan Bahasa ibunya, 30 persen berbahasa Rusia dan tiga persen Bahasa lainnya.

Penduduk berbahasa Rusia terpusat di wilayah tenggara, yang mencapai 91 persen di Sevastopol, 77 persen di Crimea, 75 persen di Donetsk dan 69 persen di Hank. Walaupun telah ada bukti lama bahwa orang Ukraina Timur menganggap dirinya sebagai bagian komunitas orang Ukraina, bahkan di Donbas, ada juga banyak kaitan historis dan kultural yang intens dan terus berlanjut dengan Rusia. (Oktorino, 2022)

Rusia mempunyai kepentingan terkait dengan keberadaan pelabuhan Sevastopol, Ukraina. Adalah Tsaritsa Rusia Katerina yang mendirikan Pelabuhan Sevastopol yang berlokasi di Pesisir Barat Daya Semenanjung Krimea tahun 1783. (Ornay & Azizah, 2022)

Dilihat dari Traktat Persahabatan, Kerja Sama dan Kemitraan yang ditandatangani oleh Moskow dan Kiev tahun 1997, status Sevastopol sebagai bagian dari Ukraina telah diakui oleh Rusia. Di sisi lain Ukraina memberi hak kepada Rusia untuk tetap menempatkan pangkalan angkatan laut di Sevastopol maupun armada lautnya di Krimea hingga 2017. Sekitar 25 ribu personel tentara rusia beserta 100 kapal perangnya diizinkan berada di sana sesuai kesepakatan kedua negara. (indonesia.rbth.com, 2014)

Meski ada bukti bahwa orang Ukraina Timur menganggap dirinya sebagai bagian komunitas orang Ukraina, seperti ditemukannya banyak kaitan historis dan kultural yang intens dan terus berlanjut dengan Rusia di Donbas, namun menimbulkan perbedaan persepsi antara orang Ukraina Timur dan orang Ukraina Barat. Kaitan tersebut nyatanya dipandang positif di Ukraina Timur, tetapi orang Ukraina Barat cenderung menganggapnya sebagai hal negatif.

Pada Rabu 5 Oktober 2022, Rusia mencaplok (aneksasi) 4 wilayah Ukraina (Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia). Aksi tersebut sontak mendapat respons internasional. Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak mengakui keempat wilayah tersebut merupakan bagian dari Rusia. Pihak Barat pun menyiapkan sejumlah sanksi.

Dewan Keamanan (DK) PBB dengan inisiasi Amerika Serikat (AS) mengeluarkan resolusi bahwa mengutuk aksi pencaplokan Rusia atas wilayah Ukraina. Atas sikap DK PBB itu, Rusia menggunakan hak veto-nya untuk menolak resolusi tersebut. Dengan hak veto itu, artinya Rusia dapat membatalkan resolusi yang dikeluarkan PBB. Di sisi lain

China dan India memilih untuk abstain terkait keputusan itu. India dan China beralasan memiliki hubungan yang baik dengan Rusia sekaligus Barat.

Di sisi lain, 300 ribu warga Rusia diminta jadi tentara cadangan dalam operasi militer khusus di Ukraina. Akibatnya banyak warga memilih keluar Rusia hingga melukai diri sendiri agar tidak dijadikan tentara cadangan.

Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya mengumumkan untuk mengerahkan tentara cadangan pada 21 September 2022. Pasukan cadangan ini diturunkan untuk berperang di Ukraina. Mobilisasi pasukan cadangan memiliki tujuan untuk menopang kekuatan pasukan Rusia di Ukraina.

Mereka yang bergabung dengan mobilisasi pasukan cadangan dilatih di 80 tempat pelatihan dan enam pusat pelatihan. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memerintahkan supaya komandan militer dan pimpinan angkatan laut membantu menyesuaikan tentara cadangan yang telah direkrut untuk siap bertempur.

Sergei juga meminta agar pasukan cadangan untuk melakukan pelatihan tambahan di bawah bimbingan perwira tentara yang sudah memiliki pengalaman tempur. Selanjutnya, orang-orang yang dimobilisasi dapat dikirim ke zona pertempuran setelah menjalani pelatihan dan koordinasi tempur. Pusat perekrutan tentara Rusia diminta untuk tidak menolak sukarelawan, bila tidak ada alasan yang serius.

Mobilisasi pasukan cadangan Rusia telah menimbulkan adanya protes dan eksodus pria-pria yang ingin direkrut militer. Puluhan ribu orang akhirnya melarikan diri dari wajib militer, ke negara tetangga bekas Uni Soviet. Dalam dua pekan, Kazakhstan melaporkan telah menerima lebih dari 200 ribu pendatang yang melarikan diri dari Rusia.

Presiden Rusia menegaskan tidak akan mengembalikan Uni Soviet. Putin menyatakan Uni Soviet sudah menjadi masa lalu dan Rusia tidak membutuhkannya lagi. Penasehat keamanan AS menyebut ada risiko Rusia akan menggunakan senjata nuklir. Namun senjata itu tidak digunakannya dalam waktu dekat.

Putin mempermudah warga negara asing (WNA) menjadi warga Rusia bila mau menjadi tentara cadangan. Selama setahun bakal jadi WN Rusia dan minimal 6 bulan mengikuti operasi militer. Pengumuman itu ditujukan kepada warga eks Uni Soviet di Asia Tengah, di mana nantinya mereka bisa mendapat pendapatan yang lebih besar bila bekerja di Rusia dibanding negara asal yang lebih miskin.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai efektivitas penempatan tentara cadangan dalam perang Rusia-Ukraina. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk: (a) menggali terminologi tentara cadangan; (b) memahami perang Rusia-Ukraina; (c) mendeskripsikan alasan Rusia menginvasi Ukraina; (d) menggali efektivitas penempatan tentara cadangan dalam Perang Rusia-Ukraina.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tentara Cadangan**

Joni Widjayanto et al (2021) dalam penelitiannya menyebut tentara cadangan merupakan warga negara yang disiapkan dan diorganisir untuk dikerahkan melalui

mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Selanjutnya tentara cadangan dibentuk dan diatur sesuai keperluan komponen utama. Mereka diyakini memiliki kekuatan pengganda untuk memperkuat komponen utama saat bertugas.

Tentara cadangan adalah sebutan bagi warga negara yang memiliki perpaduan antara karier atau peran militer dengan karier sipil. Peran militer diwujudkan saat mereka telah menerima pendidikan dan pelatihan dasar militer, kemudian disiapkan untuk semaksimal mungkin dalam menghadapi pertempuran. Hal ini dilakukan ketika negara memerlukan tentara cadangan untuk ikut serta berperang, menyerang musuh atau mempertahankan diri dari serangan lawan.

Tentara cadangan mendapatkan perlakuan sama dengan pasukan militer ketika mereka aktif dalam melaksanakan tugasnya. Sebagian besar negara memiliki tentara cadangan sebagai bagian sistem pertahanan negara. Tentara cadangan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu sedang dalam dinas aktif dan sedang tidak dalam dinas aktif. Saat dinas aktif tentara cadangan dapat disamakan sebagai wajib militer karena melakukan tugas negara dalam pertahanan negara.

Apabila tentara cadangan selesai melaksanakan dinas aktif, maka akan kembali pekerjaan sebelumnya sesuai dengan profesinya di luar tugas pertahanan negara. Dengan demikian, secara umum karakteristik tentara cadangan adalah fungsi mobilisasi dan fungsi demobilisasi, sehingga tentara cadangan tidak dianggap sebagai bagian dari suatu kelembagaan yang tetap, tetapi tergantung dari perkembangan lingkungan strategik yang salah satu faktor utamanya adalah ancaman pihak eksternal.

Dalam keadaan perang, tentara cadangan digunakan untuk mendukung militer aktif dalam mempertahankan negara. Ada keuntungan suatu negara memiliki tentara cadangan, yakni untuk meningkatkan kekuatan militer aktif dalam waktu singkat. Tentara cadangan yang sudah pernah mengikuti latihan dasar militer sebelumnya, akan lebih mudah diterjunkan ke medan peperangan dibandingkan personel militer yang baru dilatih. Dengan memiliki tentara cadangan, negara akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan pertahanannya.

Keikutsertaan sipil dalam pembangunan kekuatan pertahanan melalui jalur tentara cadangan akan meningkatkan kualitas pertahanan. Dengan sistem rekrutmen tentara cadangan, pemerintah juga akan menghindari pengeluaran dengan biaya yang besar. Secara ekonomi, tentara cadangan akan menjadikan sistem kekuatan pertahanan nasional lebih efisien, lantaran dengan digunakannya tentara cadangan maka hanya turun ke medan pertempuran apabila diperlukan saja.

Namun ada hal yang perlu menjadi perhatian pada tentara cadangan yang biasanya kurang mengikuti perkembangan kemajuan teknologi persenjataan sehingga memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap lingkungan dan persenjataan baru, dengan konsekuensi waktu pelatihan dasar militer mereka yang tergolong singkat. (Susdarwono, 2020).

### **Ancaman Militer**

Menurut Sumaryo Suryokusumo (2016), terdapat 3 hal yang disebut adanya ancaman kekerasan militer terhadap suatu negara menurut hukum internasional, antara lain: pertama, jika suatu negara melakukan aksi-aksi yang berpotensi mengancam dan melanggar perdamaian serta melakukan tindakan agresi terhadap negara lain. Kedua,

jika negara melakukan tindakan provokasi sehingga mengancam eksistensi negara lainnya, maka dapat dilancarkan serangan militer terhadap negara yang melakukan aksi provokasi itu. Ketiga, Adanya kekuatan militer asing di suatu negara atas permintaan negara tertentu, baik melalui atau tanpa perjanjian tidak dibenarkan oleh piagam PBB atau hukum internasional, walaupun tujuannya membela kepentingan nasional atau dalam hal pertahanan nasional.

Pencegahan ancaman militer hingga kini masih menjadi prioritas setiap negara. Tingkatan ancaman militer terhadap suatu Negara pun bervariasi, tergantung dari apa yang memicu terjadinya konflik tersebut. Mulai dari pelanggaran batas teritorial, hukuman, perebutan batas teritorial negara, invasi, ancaman, pembumihangusan sebuah negara dengan adanya blokade pengeboman.

## **METODE**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian non-hipotesis. Metode kualitatif dalam hal ini, merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam (Supriatin, F. E., et.al, 2022). Menurut Creswell (2003), definisi pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Dengan pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melaksanakan studi pada situasi yang alami, dimana peneliti mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang efektivitas penempatan tentara cadangan dalam perang Rusia-Ukraina.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atau deskripsi mengenai fenomena yang terjadi dan menganalisis suatu hasil penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yakni mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data primer, penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian dengan mencari bahan-bahan kepustakaan dalam bentuk buku, jurnal, situs internet, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Sedangkan dalam pengumpulan data sekunder, penulis mencari sumber data dari berita-berita cetak maupun elektronik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### Awal Mula Perang Rusia-Ukraina

Rusia akhirnya melakukan serangan ke Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengumumkan dimulainya perang secara resmi pada 24 Februari 2022. Serangan dilancarkan dengan peledakan sejumlah kota di Ukraina, seperti wilayah Mariupol, Odessa, Kharkiv dan Kyiv.

Sebelum terjadinya perang, Ukraina memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Namun pemimpin Ukraina saat ini Volodymyr Zelensky condong lebih dekat dengan Barat dan berniat menjadi bagian dari NATO.

Pada periode Perang Dingin, sebelum 1990, warga Ukraina dan Rusia bersatu dalam satu negara federasi yang disebut Uni Soviet. Setelah pengunduran diri Gorbachev pada Desember 1991, Presiden Rusia saat itu, Boris Yeltsin, melakukan reformasi liberal radikal yang menyebabkan adanya pukulan sosial politik bersamaan dengan tekanan Moskow terhadap Ukraina untuk menerima suatu kerja sama ekonomi bilateral di bawah ancaman blokade ekspor produk industri Rusia ke Ukraina.

Pada Januari 1992, parlemen Rusia mulai mempertanyakan 'keabsahan' pemindahan Crimea dari Rusia ke Ukraina pada zaman Khrushchev, yang berpotensi melanggar perjanjian Minsk Desember 1991 dan mengabaikan perbatasan yang ada. Sebelumnya, pada Oktober 1991, setelah penolakan republik-republik yang memisahkan diri untuk bergabung dengan uni politik yang baru, Yeltsin mengancam akan mengubah perbatasan menjadi menguntungkan Rusia apabila Ukraina dan negara-negara yang lain memilih untuk meninggalkan Uni Soviet.

Pada akhir tahun 1991, kemungkinan konflik nuklir dibahas secara serius dalam parlemen Ri Pada bulan November, kementerian pertahanan dan kementerian dalam negeri Soviet mengeluarkan suatu pernyataan bersama yang memperingatkan Azerbaijan, Georgia, Moldova, dan Ukraina untuk tidak menasionalisasi properti militer dan mengambil alih instalasi militer maupun persenjataan. Pembentukan Commonwealth of Independent States (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, atau CIS) pada bulan Desember 1991 terutama dianggap sebagai tekanan terhadap republik-republik eks-Uni Soviet untuk menerima Rusia "sebagai yang dituakan di antara yang sederajat." Para komandan militer Rusia, menentang setiap usaha untuk membagi kekuatan nuklir, konvensional, dan laut Uni Soviet. Namun Pernyataan Minsk mengenai Kekuatan Strategis pada Desember 1991 kemudian diyakini telah memecahkan keprihatinan itu lewat kesepakatan untuk "menjalankan suatu kebijakan terkoordinasi di area keamanan internasional, perlucutan senjata, dan kontrol persenjataan."

Pada tanggal 5 Mei 1992, konstitusi Ukraina pada mulanya diadopsi bersama suatu Pernyataan Kemerdekaan Crimea, tetapi satu minggu kemudian parlemen mengamandemen konstitusi yang baru untuk menegaskan bahwa Crimea "adalah sebuah bagian yang sah dari republik Ukraina," sehingga menentang seruan "kemerdekaan." Kyiv kemudian berunding dengan Crimea untuk memberikannya otonomi maksimum.

Perselisihan Rusia-Ukraina lainnya meliputi klaim Rusia terhadap wilayah tenggara Ukraina, harga minyak dan bahan mentah, pembagian aset Soviet, nasionalisasi cadangan emas oleh Rusia pemisahan mata uang dan isu-isu berkaitan dengan pembayaran ulang utang luar negeri, "kunci ganda" pengaturan senjata nuklir, tanggung jawab atas bencana Chernobyl, dan keinginan Ukraina untuk membangun angkatan

darat, angkatan laut, angkatan udara, dan garda nasional berkekuatan 200.000 hingga 450.000 orang yang menguras banyak biaya, sementara tentara bekas Soviet dipangkas setengahnya. Kata sandi senjata nuklir masih dipegang Rusia, tetapi mereka khawatir bahwa Kyiv akhirnya akan mengubahnya.

Salah satu blunder terbesar Kyiv adalah klaim awalnya terhadap seluruh Armada Laut Baltik. Bahkan kendati klaim ini akhirnya dikurangi menjadi 30 persen, dan Moskow maupun Kyiv sepakat untuk membentuk suatu komando gabungan selama tiga tahun, klaim tersebut memperkuat perlawanan kubu nasionalis Rusia terhadap Yeltsin, yang lebih bersedia memberikan konsesi kepada Ukraina. Selain itu, Kyiv juga kelihatannya enggan menyerahkan senjata nuklirnya dan mengaitkan perlucutan senjata nuklirnya dengan jaminan keamanan melihat ancaman Rusia terhadap Crimea—ditambah tuntutan pembayaran dan kompensasi pada saat yang sama ketika Presiden Bush dan Presiden Yeltsin hendak menandatangani START II.

Akibatnya, Kyiv dianggap melakukan pemerasan nuklir pada saat banyak pihak berharap menghapuskan seluruh senjata nuklir di dunia, seakan-akan Ukraina dapat mengatasi kemampuan serang nuklir Rusia yang lebih superior.

Dalam kebijakan luar negeri, Ukraina (bersama Jerman) mengakui kemerdekaan Kroasia dan Slovenia yang bertentangan dengan kepentingan Rusia yang mendukung Yugoslavia yang didominasi Serbia dengan imbalan pengakuan awal Bonn/ Berlin, terhadap hak Ukraina yang pada saat itu di atas kertas masih terikat dalam kerangka Uni Soviet untuk menentukan nasib sendiri.

Pada awal tahun 1992, selama proses "perceraian Rusia-Ukraina, pemimpin yang pura-pura pro Rusia, Leonid Kucma, mengumumkan keinginan Kyiv untuk menjadi anggota NATO ketika, pada saat yang sama, Rusia mulai membentuk Collective Security Treaty Organization (CSTO). Dengan demikian, Ukraina memulai keinginannya untuk menjadi anggota NATO, yang terutama diakibatkan oleh tekanan Rusia. Kendati demikian, NATO tidak menginginkan Ukraina bergabung dan hanya menawarkan kemitraan khusus pada tahun 1997 demi menjaga keseimbangan hubungan dengan Rusia.

Pada bulan Juli 1993, kekhawatiran bahwa Ukraina akhirnya akan mengusir Armada Laut Hitam dari Crimea membuat parlemen Rusia memberikan suara yang menyatakan Sevastopol sebagai bagian dari Rusia. Para pejabat dan media Amerika Serikat menanggapi dengan menekan Moskow agar menyerahkan Sevastopol di bawah kontrol Ukraina. Duta besar Amerika Serikat di Kyiv, Roman Popadiuk, bahkan mengeluarkan sebuah pernyataan tanpa menunggu persetujuan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat—yang menegaskan “bahwa bagi Amerika Serikat, saya garis bawahi, Sevastopol adalah sebuah bagian integral dari Ukraina, Crimea adalah bagian integral dari Ukraina.

Intervensi kekuatan luar ini membuat kecewa pemerintah Yeltsin (dan pendukung pan-nasionalis) serta menguatkan keprihatinan Rusia bahwa Amerika Serikat mendukung kemerdekaan Ukraina.

Kekecewaan Rusia terhadap sikap independen Ukraina beralasan. Pada bulan Februari 1992, dua bulan sesudah bubarnya Uni Soviet, survei yang diadakan Yayasan Opini Publik yang berbasis di Moskow menemukan bahwa orang Rusia tidak dapat menerima kemerdekaan Ukraina, Ukraina bukan lagi bagian dari “Rusia” (yaitu Uni

Soviet) serta orang Ukraina dan Rusia secara politik kini sederajat. Tiga perempat orang Rusia menginginkan sebuah uni dengan Ukraina dan Belarus dan hampir setengahnya (49 persen) mendukung Rusia dan Ukraina dijadikan sebuah negara. Dua survei lainnya menemukan 64 persen responden mendukung sebuah uni RusiaUkraina sementara 81,2 persen orang Rusia yakin bahwa Rusia dan Ukraina harus bersatu.

Survei awal ini menunjukkan bagaimana sebuah Ukraina yang merdeka tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang Rusia. Orang Rusia tidak dapat memikirkan orang Ukraina sebagai “orang asing” dan tidak memiliki hubungan dekat orang Rusia sebagaimana hubungan dekat mereka dengan Belarus. Bagi orang Rusia, tidak terbayangkan bahwa mereka bisa hidup tanpa Ukraina dan Belarus, karena ide tersebut menantang imajinasi, baik secara politik maupun intelektual. Ketidakmampuan sikap politik dan mitos massa Rusia untuk “menerima eksistensi adalah bagian integral dari Ukraina.” Intervensi kekuatan luar ini membuat kecewa pemerintah yYeitsin (dan pendukung pan-nasionalis) serta menguatkan keprihatinan Rusia bahwa Amerika Serikat mendukung kemerdekaan Ukraina. Kekecewaan Rusia terhadap sikap independen Ukraina beralasan. Pada bulan Februari 1992, dua bulan sesudah bubarnya Uni Soviet, survei yang diadakan Yayasan Opini Publik yang berbasis di Moskow menemukan bahwa orang Rusia tidak dapat menerima kemerdekaan Ukraina, Ukraina bukan lagi bagian dari “Rusia” (yaitu Uni Soviet) serta orang Ukraina dan Rusia secara politik kini sederajat. Tiga perempat orang Rusia menginginkan sebuah uni dengan Ukraina dan Belarus dan hampir setengahnya (49 persen) mendukung Rusia dan Ukraina dijadikan sebuah negara. Dua survei lainnya menemukan 64 persen responden mendukung sebuah uni RusiaUkraina sementara 81,2 persen orang Rusia yakin bahwa Rusia dan Ukraina harus bersatu.

Survei awal ini menunjukkan bagaimana sebuah Ukraina yang merdeka tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang Rusia. Orang Rusia tidak dapat memikirkan orang Ukraina sebagai “orang asing” dan tidak memiliki hubungan dekat orang Rusia sebagaimana hubungan dekat mereka dengan Belarus. Bagi orang Rusia, tidak terbayangkan bahwa mereka bisa hidup tanpa Ukraina dan Belarus, karena ide tersebut menantang imajinasi, baik secara politik maupun intelektual. Ketidakmampuan sikap politik dan mitos massa Rusia untuk “menerima eksistensi sebuah negara atau sebuah bangsa Ukraina” terlihat dari pernyataan salah seorang duta besar Rusia yang pernah bertugas di Kyiv, Yuri Dubynin: “Tentu saja Ukraina bukanlah sebuah negeri di seberang lautan bagi kami. Kelihatannya tidak cukup dikatakan bahwa orang Ukraina merupakan bangsa yang sangat dekat dengan kami. Mereka adalah saudara dekat dan bangsa sekandung.”

Pandangan semacam inilah yang membuat Yelt-sin begitu lama menunda menandatangani perjanjian perbatasan kedua negara, kendati Leonid Kucma terpilih dalam pemilihan presiden Ukraina tahun 1994 karena platform pro-Rusia yang moderat maupun ketidak tertarikan Rusia untuk membuat garis demarkasi dan membatasi perbatasan mereka. Kedekatan Rusia dan Ukraina sendiri dapat dikatakan sebagai produk dari fakta “sejarah negeriku dimulai dari sini!”, yaitu bahwa “Rusia Kiev” (di Ukraina) merupakan tempat lahirnya negara Rusia pertama. Pengambilalihan sejarah Ukraina oleh Rusia, khususnya Kyiv Rus, sebagai “tanah Rusia kuno” menyebabkan Ukraina dianggap sebagai bagian dari bangsa pan-Rusia.



Ketika Kucma terpilih pada bulan Juli 19 1994 dengan mengalahkan Kravchuk yang “nasionalis” dan berasal dari Ukraina barat, presiden baru Ukraina tersebut yakin bahwa, sebagai seorang Ukraina timur, ia dapat memperbaiki hubungan dengan Rusia. Namun, tidak demikian yang terjadi, dan diperlukan waktu tiga tahun sebelum Yeltsin akhirnya mengunjungi Ukraina dan menandatangani sebuah perjanjian yang mengakui perbatasan Ukraina serta dua tahun lagi bagi kedua kamar dalam parlemen Rusia untuk meratifikasinya.

Dengan kata lain, normalisasi hubungan Rusia-Ukraina memerlukan waktu seluruh masa jabatan kepresidenan pertama Kucma (1994-1999). Pada tahun 2019, seperempat abad kemudian, Volodymyr Zelensky, yang sama-sama berasal dari Oblast Dnipropetrovsk seperti Kucma, juga yakin bahwa ia dapat lebih berhasil dibandingkan Petro Poroshenko “yang nasionalis” untuk mencapai sebuah kesepakatan damai di Donbas, tetapi ia juga terbukti tidak berhasil “menormalisasi” hubungan.

Selama tiga dasawarsa pasca-ambruknya Uni Soviet, hubungan Rusia dengan Ukraina yang merdeka terus bermasalah. Kyiv akan tetap memiliki hubungan buruk dengan Moskow apabila para presiden Ukraina tidak menjalankan kebijakan identitas Slavia timur sebagaimana yang diterapkan oleh Belarus pimpinan Aliaksandr Lukashenka. Para pemimpin Ukraina yang tidak mencontoh Belarus akan dicap “nasionalis”—entah mereka pengguna bahasa Ukraina atau Rusia dan tidak peduli apakah mereka berasal dari barat atau timur Ukraina.

Elite Rusia sendiri mengadopsi sikap dan pandangan elite Soviet terhadap republik-republik bekas Soviet. Para pejabat Soviet yang menjadi pejabat Rusia mengalihkan metode angkuh Soviet mereka alam berurusan dengan para pemimpin republik yang baru. Federasi Rusia meyakini bahwa hanya mereka, bersama Republik Rakyat China dan Amerika Serikat yang merupakan negara berdaulat sejati dengan sejarah, budaya, identitas, ekonomi, dan militernya sendiri yang dapat menegaskan kepentingan nasionalnya. Keempat belas republik Soviet non-Rusia, terutama negara “artifisial” seperti Ukraina, tidak pernah dianggap memiliki kedaulatan.

Selain alasan historis dan rasial budaya, Ukraina memiliki arti penting bagi Rusia karena alasan politik, ekonomi dan geostrategis. Kedua negeri berbagi perbatasan yang panjangnya lebih dari 2.200 kilometer. Negeri dengan luas wilayah terbesar kedua di Eropa, Ukraina secara geografis dekat dengan kawasan Volga, yang dianggap sebagai salah satu pusat industri dan politik Rusia. Ukraina merupakan salah satu sumber paling penting bagi perekonomian Rusia.

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1991, Ukraina menjadi negara paling penting di bekas wilayah Soviet, dan Rusia maupun Barat bersaing memperebutkan pengaruh di negeri tersebut. Sementara daya tarik Barat mengundang negara-negara bekas Soviet (termasuk Ukraina) ke arahnya, Rusia berusaha memelihara ruang lingkup pengaruhnya di bekas wilayah Soviet dengan menggunakan kekuatan kerasnya, sebagaimana yang dilakukannya di Georgia dan, kemudian, Ukraina.

Melihat sangat vitalnya ekspor energi bagi perekonomian Rusia, dan jalur pipa gas alam utama dari Rusia ke Eropa melewati wilayah Ukraina, tidak sulit untuk mengerti arti penting Ukraina dalam pengiriman sumber-sumber energi Rusia ke Eropa. Kehilangan dominasi politik atas pemerintah Kyiv sama artinya dengan kemungkinan pembatasan kontrol Moskow terhadap jalur pipa energi, sehingga, sebaliknya, Rusia

akan tergantung pada Ukraina untuk mengeksplor minyak dan gasnya ke Eropa. Pada saat bersamaan, pengaruh Rusia terhadap negara-negara Eropa lewat sumber-sumber energinya akan berkurang.

Ukraina sendiri adalah zona penyangga terakhir antara NATO dan Rusia, dan sangat jelas bahwa Kremlin tidak akan pernah bersedia membiarkan organisasi militer Barat itu berada di kebun belakangnya. Skenario semacam itu, yang dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi Rusia, akan memungkinkan NATO mengepung perbatasan Rusia dengan basis-basis militer. Bagi Rusia, masalah terpenting adalah mencegah Ukraina bergabung dengan organisasi Barat mana pun, terutama NATO. Sebaliknya, di mata Barat, Ukraina memiliki arti strategis yang penting untuk mencegah ekspansi Rusia ke barat.

Kota-kota pelabuhan Ukraina secara ekonomi dan militer penting bagi Ukraina dan Rusia. Arti strategis Crimea, yang berada di pusat Laut Hitam, tidak bisa diabaikan ketika berkaitan dengan kepentingan Rusia. Secara geografis, Crimea terletak di pinggiran selatan bekas Uni Soviet. Bahkan, markas besar Armada Laut Hitam Rusia sebelumnya berada di Crimea. Hingga aneksasi Crimea, pangkalan besar angkatan laut Rusia itu disewa dari Ukraina dan berada di Sevastopol di Semenanjung Crimea. Dibandingkan basis-basis Rusia lainnya di Laut Hitam, Sevastopol terletak di tempat lebih strategis sebagai salah satu aspek paling penting di belakang intervensi militer Rusia pada tahun 2014.

Apabila menguasai Crimea, Rusia bukan hanya dapat mengancam bagian selatan Ukraina, tetapi juga membuat Laut Azov menjadi sebuah danau Rusia. Rusia juga tahu bahwa penguasaan atas Crimea akan memiliki keuntungan strategis karena berada lebih dekat dengan negara-negara NATO yang juga berada di Laut Hitam—yaitu Turki, Rumania, dan Bulgaria—sekaligus memberikannya keuntungan untuk mengawasi perkembangan militer di kawasan Laut Hitam. Apalagi belakangan Amerika Serikat telah mendirikan basis-basis militer di Rumania dan Bulgaria, di mana pangkalan udara Amerika di kedua negara hanya berjarak sekitar 550 kilometer dari Sevastopol.

Ketegangan antara Rusia dan Ukraina dalam banyak isu sejak bubarnya Uni Soviet menimbulkan desas desus sejak tahun 1997 di antara para elite Rusia mengenai kemungkinan disintegrasi Ukraina dan penggabungan beberapa bagian wilayahnya ke dalam Rusia. Kemungkinan terjadinya hal tersebut semakin mengemuka ketika Ukraina menjadi ajang persaingan geopolitik dan geostrategis yang sengit antara Uni Eropa/Amerika Serikat dan Rusia, yang kemudian melahirkan krisis besar di Ukraina. (Oktorino, 2022)

### **Memanas Sejak Akhir 2021**

Isu serangan militer Rusia ke Ukraina bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan pengerahan pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Menurut Barat, Moskow memobilisasi lebih dari 100 ribu tentara bersama dengan tank dan perangkat kekuatan militer lainnya. Saat itu, intelijen Barat menuding Rusia bakal melancarkan serangan ke Ukraina.

Selanjutnya Desember 2021, Presiden AS Joe Biden memperingatkan Rusia akan ada sanksi ekonomi dari pihak Barat jika tetap bersikukuh menyerang Ukraina, karena laporan yang semakin intens dari intelijen soal penempatan militer Rusia di perbatasan.

Sejumlah pemimpin Negara di Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga turun tangan menginisiasi adanya perundingan di antara kedua negara.

Di sisi lain, Rusia mulai menggelar latihan militer yang masif sejak awal Januari 2022. Seluruh kekuatan angkatan laut juga dikerahkan. Latihan ini juga dilakukan di darat. Rusia bekerjasama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya.

### **Pemicu Serangan ke Ukraina**

Para ahli meyakini dibalik kebijakan Putin ini, memiliki tujuan untuk memaksa adanya perubahan di Ukraina. Rusia menginginkan kepemimpinan Ukraina diganti menjadi pro Moskow. Dalam pidatonya, Putin memastikan Rusia melancarkan serangan besar di seluruh teritorial Ukraina dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Kyiv dengan cara militer. Meskipun Putin mengklaim sebaliknya, kemungkinan invasi ini akan mencakup pendudukan beberapa wilayah di Ukraina oleh pasukan Rusia.

Sembilan dari 30 negara menyatakan dukungan kepada Ukraina masuk anggota NATO. Mereka di antaranya Ceko, Estonia, Latvia, Lithuania, Makedonia Utara, Montenegro, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Sementara pihak Rusia mencemooh tindakan Zelensky ingin masuk NATO lewat jalur cepat. Ia menyebut langkah itu justru akan mempercepat dimulainya perang dunia III.

Ukraina merespons memohon kepada NATO agar proses keanggotaannya dipercepat pasca pencaplokan 4 wilayahnya oleh Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kyiv tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjabat.

### **Penempatan Tentara Cadangan Rusia di Ukraina**

Rusia berusaha mempercepat mobilisasi militer, dengan mengerahkan penduduknya untuk mengikuti program wajib militer, guna memperkuat pasukannya dalam perang melawan Ukraina. Pada 14 Oktober 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan angkatan bersenjata telah menerima 33 ribu peserta wajib militer. (Tempo, 2022)

Putin menyatakan 222 orang saat ini menjadi bagian dari unit pembentukan pasukan. Sejumlah 33 ribu orang yang dimobilisasi ditempatkan di unit dan 16 ribu ditempatkan di yang ditugasi dalam misi tempur. Adapun upaya mobilisasi ini akan diselesaikan dalam waktu dua pekan.

Putin mengumumkan mobilisasi militer untuk memperkuat tentara cadangan pada 21 September 2022. Menteri pertahanan Rusia Shoigu merinci 300 ribu orang harus ikut wajib militer, terutama mereka yang memiliki pengalaman tempur dan keahlian militer yang dibutuhkan tentara negara beruang merah.

Selain menawarkan uang, pemerintah juga menjanjikan penduduk agar menjadi prajurit dengan benefit menerima bahan pangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Setiap keluarga prajurit akan mendapat seekor domba hidup, 50 kilogram tepung, dua kantong kentang, dan kol sesuai dengan kebutuhan.

Namun banyak orang yang menolak kebijakan ini. Puluhan ribu warga Rusia berusaha menghindari wajib militer dan berbondong-bondong menyeberang ke negara tetangga, seperti Georgia, Mongolia, Finlandia, dan Kazakstan. Pejabat Kazakstan

menyatakan sekitar 40 ribu warga Rusia telah masuk ke negaranya dan kemudian melanjutkan perjalanan ke negara lain, terutama Uzbekistan dan Kirgistan.

Pemerintah Rusia kembali mencoba meningkatkan upaya mobilisasi itu. Perekrut pun menggunakan metode baru yang justru ditentang oleh para politikus. Tentara dan polisi mulai memeriksa dokumen identitas orang-orang yang lewat di sekitar pintu masuk stasiun kereta api bawah tanah di Moskow dan Saint Petersburg. Mereka juga membagikan pengumuman wajib militer kepada para lelaki yang dianggap memenuhi syarat di lorong gedung apartemen. (The Moscow Times, 2022)

Perekrut bahkan memaksa orang-orang untuk ikut wajib militer. RBC Daily, media cetak di Moskow, melaporkan bahwa petugas yang merekrut telah menangkap orang-orang di Distrik Kalininsky, Saint Petersburg, agar mengikuti wajib militer. Pejabat pemerintah Saint Petersburg membenarkan hal tersebut. Orang-orang yang telah menerima panggilan wajib militer namun tidak muncul di komisariat militer dan tidak memberikan kredensial tentang keadaan mereka, telah diberikan surat panggilan ulang.

### **Kritik Penempatan Tentara Cadangan**

Kirill Kabanov, anggota Dewan Hak Asasi Manusia Kepresidenan Rusia, mengkritik 'serangan' militer terhadap penduduk semacam ini. Pihaknya meminta Ketua Dewan Hak Asasi Manusia menggugat hal ini ke Kejaksaan Rusia. Menurutnya sulit untuk menilai kerugian moral dan sosial-politik serta konsekuensi dari tindakan tersebut.

Anggota Dewan Federasi Rusia, Andrey Klishas juga memprotes cara mobilisasi paksa seperti ini. Ia menegaskan setiap pesan harus diverifikasi dan jika dikonfirmasi, tindakan pejabat yang memberi wewenang pemaksaan tersebut harus dinilai secara hukum. Perekrut bahkan memobilisasi para tunawisma. Food Not Bombs, yang merupakan para aktivis penentang perang yang biasa membagikan makanan vegan gratis, melaporkan bahwa perekrutan terjadi di Hanggar Keselamatan, organisasi Gereja Ortodoks yang membantu para tunawisma di Moskow.

Menurut mereka, sejumlah orang dibawa ke bus dengan sedikit paksaan menuju tempat perekrutan. Beberapa kemudian dibebaskan karena tidak memenuhi syarat, seperti syarat usia dan kesehatan. Perekrutan ini terjadi di tengah kemunduran Rusia dalam invasi ke Ukraina. Menurut data yang dimiliki Menteri Sergey Shoigu, mereka telah kehilangan 5.937 tentara dalam perang, angka resmi pertama yang pernah diumumkan, sedangkan Kementerian Pertahanan mengklaim hanya 1.351 tentara yang tewas.

Rusia diperkirakan telah menerjunkan 150 ribu anggota pasukan sejak akhir Februari 2022. Bila perekrutan 300 ribu prajurit melalui wajib militer tercapai, kekuatan Rusia akan berlipat ganda. Meskipun demikian, bukan berarti militer Rusia menjadi lebih digdaya.

Institute for the Study of War, lembaga riset AS yang memantau perang di Ukraina menyatakan militer Rusia adalah gabungan sistem wajib militer dan tentara cadangan tradisional dengan sistem kontrak profesional. Angkatan Darat Rusia telah berupaya untuk memprofesionalkan jajarannya, khususnya dalam 15 tahun terakhir, tapi mereka tetap bergantung pada wajib militer, baik untuk pasukan aktif maupun tentara cadangan jika terjadi mobilisasi. Prajurit kontrak terkonsentrasi di unit kader dan elit, sedangkan

sebagian besar unit tempur harus diisi oleh tentara cadangan yang dimobilisasi agar mampu berperang.

Tentara cadangan Rusia beranggotakan lebih dari 2 juta tentara bekas wajib militer dan prajurit kontrak, tapi hanya sedikit yang secara aktif dilatih atau dipersiapkan untuk perang. Secara historis, hanya 10 persen dari tentara cadangan yang menerima pelatihan penyegaran setelah menyelesaikan masa tugas mereka. (Institute for the Study of War, 2022)

Selain itu, Rusia tidak memiliki kapasitas administrative dan keuangan untuk melatih pasukan cadangan secara berkelanjutan. Menurut analisis RAND (2019), Rusia hanya memiliki 4.000-5.000 orang sebagai tentara cadangan aktif, yakni yang mengikuti pelatihan rutin bulanan dan tahunan. Sisanya memerlukan latihan selama sedikitnya 6 bulan sebelum dapat diterjunkan di medan perang.

## KESIMPULAN

Tentara cadangan merupakan warga negara yang mempunyai kombinasi antara karier atau peran militer dengan karier sipil. Rusia merekrut ratusan ribu tentara cadangan untuk memperkuat pasukannya dalam perang melawan Ukraina. Selain diberikan uang, mereka juga diiming-imingi dengan bantuan bahan pangan. Petugas perekrut menggunakan metode baru dalam menjalankan tugasnya. Tentara dan polisi mulai memeriksa dokumen identitas orang-orang yang lewat di sekitar pintu masuk stasiun kereta api bawah tanah di Moskow dan Saint Petersburg. Mereka juga membagikan pengumuman wajib militer kepada para laki-laki yang dianggap memenuhi syarat di lorong gedung apartemen.

Kebijakan ini tidak efektif, karena tak semua warga Rusia dapat menerima keputusan pemerintahan Putin. Puluhan ribu warga Rusia berusaha menghindari wajib militer dan berbondong-bondong menyeberang ke negara tetangga, seperti Georgia, Mongolia, Finlandia, dan Kazakstan. Tak hanya itu, kebijakan rekrutmen tentara cadangan ini juga mendapat kritikan tajam dari sejumlah pihak, seperti anggota Dewan HAM Kepresidenan Rusia, Dewan Federasi Rusia, dan aktivis penentang perang.

## REFERENSI

- Institute for the Study of War. (2022). Indicators and Thresholds for Russian Military Operations in Ukraine and/or Belarus, <https://www.understandingwar.org/background/ukraine-conflict-updates>. diakses pada Jumat (13/1/2023), pukul 14.00 Wita.
- Jack C. Plano & Roy Olton. (1999). *The International Relation Dictionary*. Clio Press: England.
- Jones, Walter S. (1993). *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia 2*, alihbahasa: Dr. Budiono Kusumohamidjojo. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. hlm.43
- Joni, Widjayanto, Dadang, D, Priyanto, Prakoso, L.Y, Risman, H, Setiadi, M.I. (2021). Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta di Abad 21. *Ejurnal Binawakya*, 16 (1), 6115-6120

- Kuniawan, Iwan. (2022). Komponen Cadangan untuk Tentara Merah, <https://majalah.tempo.co/read/internasional/167177/komponen-cadangan-dalam-invasi-rusia-ke-ukraina>, diakses pada Rabu (18/1/2023), pukul 12.05 Wita
- Litovkin, Viktor. (2014). Sevastopol Di Antara Rusia Dan Ukraina Dulu Dan Kini, <http://indonesia.rbth.com/politics/sevastopol-di-antara-rusia-dan-ukraina-dulu-dan-kini>, diakses pada Jumat (13/1/2023), pukul 13.00 Wita.
- Oktorino, Nino. (2022). *Ukraina: The Road to Armageddon*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta. Hal.62
- Rudy, T. May. (2002). *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. PT Refika Aditama: Bandung. Hal. 33
- Sangadji, S. S., Supriatin, F. E., Marlina, I., A., Paerah, A., & Dharta, F. Y. (2022, July 5). Metodologi Penelitian. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ywemh>
- Suryohadiprojo, Sayidiman. (2008). *Pengantar Ilmu Perang*. Pustaka Intermedia: Jakarta. Hal.8
- Suryokusumo, Sumaryo (2016). Ancaman Kekuatan Militer dari Luar Menurut Perspektif Internasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 8 (2), 71-76
- Susanto, Dwi. (1990). *Perubahan Politik di negara-negara Eropa Timur*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Susdarwono, Endro Tri. (2020), Tata Kelola Pemerintahan terkait Alternatif SDM Pertahanan dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pertahanan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2 (2), 192-208